

**STUDI PELAKSANAAN PROYEK SEKTOR IRIGASI TERPADU  
KE DUA DI NUSA TENGGARA BARAT:  
Kelembagaan P3A dan Program IPAIR**

***The Study of Second Integrated Irrigation Sector Project  
Implementation in West Nusa Tenggara:  
Institutional of P3A and IPAIR Program***

**Syarifuddin dan Wuryantoro**

Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian UNRAM

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui tingkat perkembangan kelembagaan P3A dan tanggapan petani terhadap fungsi dan permasalahan P3A, (2) mengetahui pelaksanaan dan partisipasi petani dalam mendukung keberhasilan program luran Pelayanan Irigasi (IPAIR). Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan mewawancarai mendalam 60 responden.

Penelitian menunjukkan (1) tingkat perkembangan kelembagaan P3A di Nusa Tenggara Barat berada pada kriteria sedang berkembang dengan pencapaian skor 11,78. (2) tanggapan anggota terhadap fungsi dan permasalahan P3A positif, (3) anggota P3A belum mengetahui manfaat yang diterima dari program IPAIR pola baru, dan (4) realisasi penerimaan IPAIR kurang dari 50%, yang disebabkan belum mantapnya kelembagaan P3A dan masih kurangnya informasi IPAIR pola baru yang diperoleh petani anggota P3A. Dari hasil yang diperoleh maka perlu adanya pembinaan secara langsung yang terkoordinasi, baik antara pemerintah dengan pengurus P3A, maupun di antara instansi pemerintah yang terkait dengan pembinaan P3A, dengan sasaran utama memperbaiki dan memantapkan kelembagaan P3A dan meningkatkan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman petani anggota P3A tentang tujuan program IPAIR pola baru.

**ABSTRACT**

*The aims of this research are: (1) to analyse the development of the level of P3A institutional and to know farmer responds to function of the organisation and problems faced by P3A; (2) to know implimentation of and farmers participation in supporting programs successful. The research use descriptive methods, and the data was collected by interviewing 60 respondents.*

---

Kata Kunci : Kelembagaan P3A, IPAIR, Proyek Sektor Irigasi Terpadu Ke Dua

Key Word : *Institutional of P3A, IPAIR, Second Integrated Irrigation Sector Project*

*The result of study indicate that: (1) the degrec P3A as an istitutional is still in developing level, with achievement score about 11.78; (2) the members of P3A respond positively both on the function and problems faced by the institutional of P3A; (3) the members of P3A do not know the benefit of IPAIR with its new paradigm; (4) achievement of IPAIR is less than 50% of the target since P3A as an institutional is not steady and lack of socialitation of IPAIR programs to the members of P3A. Therefore, government and other related institutional should give guidance in order to improve P3A as an organisation and to increase the member's awareness about the purpose of IPAIR with its new paradigm.*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999–2004 disebutkan bahwa tujuan utama pembangunan perekonomian nasional adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh tercukupinya kebutuhan dasar pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.

Dalam upaya mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar pangan dan memperluas lapangan kerja, maka kebijakan pembangunan pertanian harus diarahkan pada terciptanya perkembangan pertanian yang maju, efisien dan tangguh, yakni pertanian yang mampu meningkatkan produksi, pendapatan / kesejahteraan petani, serta mampu memperluas kesempatan kerja.

Berbagai bentuk kebijaksanaan telah ditempuh pemerintah untuk mengembangkan prasarana irigasi (pengairan). Salah satu upaya yang telah dan sedang ditempuh untuk mengatasi kondisi tersebut adalah melalui program Proyek Sektor Irigasi Terpadu Kedua atau yang lebih dikenal dengan IISP-II (*Second Integrated Irrigation Sector Project*).

Second Integrated Irrigation Sector Project (IISP-II), merupakan suatu proyek pembangunan jaringan irigasi yang dipusatkan pada Indonesia Timur. Dari sepuluh propinsi di Indonesi Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu propinsi dari empat propinsi yang memperoleh dana pembangunan Proyek Sektor Irigasi Terpadu Kedua (IISP-II) dari Asian Developmen Bank (ADB), mulai Tahun Anggaran 1994/1995. Alasan utama terpilihnya NTB mendapatkan proyek IISP-II adalah karena di propinsi ini pemanfaatan sarana irigasi masih rendah yang disebabkan oleh kondisi jaringan irigasi dan drainasi yang buruk serta masih lambatnya pelaksanaan

kebijaksanaan *Operation & Maintenance* (O&M) jaringan irigasi. Adapun tujuan dan sasaran utama program IISP-II adalah:

1. Meningkatkan produktivitas pertanian beririgasi untuk meningkatkan usahatani masyarakat pedesaan (petani) serta memperbaiki kondisi mata pencaharian mereka
2. Mengoptimalkan pemanfaatan dan daya guna jaringan yang ada untuk merealisasikan keuntungan ekonomis dari investasi yang telah ditanam pada pembangunan pertanian
3. Meningkatkan pendapatan petani.

Di Propinsi Nusa Tenggara Barat kegiatan Second Integrated Irrigation Sector Project dilaksanakan melalui empat komponen, yaitu:

1. Komponen Pembangunan Irigasi, yaitu meliputi kegiatan
  - Rehabilitasi dan Upgrading (R&U) atau peningkatan sarana irigasi yang melayani 16 daerah irigasi dengan total area 17 272 Ha.
  - Operasional pengairan (*Direct Efficient Operation & Maintenance / DEOM*).
  - Penyerahan jaringan-jaringan irigasi kecil (*Turn Over/PIK*) kepada P3A.
2. Komponen Pembangunan Pertanian, yang meliputi kegiatan:
  - Pembentukan dan pengoperasian 2 Integrated Agriculture Demonstration Unit (IADU) atau Unit Percontohan Pertanian Terpadu di 2 lokasi, yaitu di Daerah Irigasi Surabaya Lombok Tengah, dan di Daerah Irigasi Daha I/II di Dompu.
  - Peningkatan Pelayanan Pertanian, pelatihan staf dan petani
3. Komponen Perkuatan, Koordinasi, dan Monitoring, yang meliputi kegiatan:
  - Koordinasi dan Pemantuan Pelaksanaan Proyek yang telah dilaksanakan oleh seluruh komponen.
  - Pelatihan untuk perkuatan staf dan unsur pelaksana di Dati I dan Dati II.
4. Komponen Pengenalan dan Penerapan Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR), yang meliputi kegiatan:
  - Pelatihan dan pengenalan IPAIR kepada P3A
  - Pembinaan pelaksanaan program IPAIR untuk memperoleh *Cost Recovery*

Berdasarkan uraian dan kerangka pemikiran di atas, serta untuk mengetahui seberapa jauh tujuan dan sasaran program IISP-II tercapai, maka perlu dilakukan suatu kajian atau "Studi Pelaksanaan Proyek Sektor

Irigasi Terpadu Kedua (*Second Integrated Irrigation Sector Project/ IISP-II*) di NTB: Kelembagaan P3A dan Program IPAIR”.

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui tingkat perkembangan kelembagaan P3A dan tanggapan petani tentang fungsi dan permasalahan P3A, dan (2) mengetahui pelaksanaan dan partisipasi petani dalam mendukung keberhasilan program luran Pelayanan Irigasi (IPAIR).

### **Manfaat Penelitian**

1. Memberikan gambaran (informasi) secara lengkap mengenai pelaksanaan program IISP-II, serta menghasilkan informasi tentang keberhasilan dari implementasi proyek, yang berkaitan dengan kelembagaan P3A dan program IPAIR.
2. Hasil studi ini diharapkan mampu memberikan informasi sebagai masukan penting guna penyempurnaan perumusan dan pemantapan kebijaksanaan lebih lanjut untuk pembinaan, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang lebih efisien.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bersifat menggali informasi secara mendalam (*explorative research*). Pengumpulan informasi atau data dihimpun dari berbagai sumber. Data primer diperoleh dari petani, pengurus dan anggota P3A, pejabat atau aparat instansi tertentu yang terkait dengan program IISP-II, serta tokoh-tokoh masyarakat. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik survai dengan mengadakan wawancara mendalam (*in-dept interview*) dengan sejumlah responden yang telah ditentukan, serta pengamatan langsung di lapangan pada daerah-daerah yang menjadi lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder dihimpun dengan mencatat data yang telah tersedia pada instansi atau dinas yang terkait dengan pelaksanaan proyek ini. Data yang terkumpul selanjutnya disusun, diolah, dianalisis, dan dideskripsikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.

### **Teknik Penentuan Daerah Irigasi Sampel**

Lokasi penelitian di fokuskan pada daerah irigasi **Unit Percontohan Pertanian Terpadu (IADU = Integrated Agriculture Demonstration Unit)**, yaitu Daerah Irigasi Surabaya Kabupaten Lombok Tengah dan Daerah Irigasi Daha I/II Kabupaten Dompu. Selanjutnya untuk melengkapi informasi dan gambaran terhadap keberhasilan proyek secara komprehensif (menyeluruh), ditetapkan pula Daerah Irigasi Non IADU yaitu Daerah Irigasi Tiu Bulu Sumbawa dan Daerah Irigasi Parado Bima. Selain itu, ditentukan juga Daerah Irigasi Kecil yaitu Embung Bombas Lombok Tengah, DI Kempo Dompu, DI Pungkak Sumbawa, dan DI Dodu Bima.

### **Penentuan Responden**

Ada dua kelompok responden dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Responden non petani, yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat seperti Kepala Desa, Ketua LKMD, Ketua P3A, Petugas penyuluh Pertanian; dan pejabat atau staf instansi yang terkait dengan pelaksanaan program IISP-II.
- b. Responden petani, adalah petani anggota P3A, yang masing-masing ditetapkan sebanyak 6 orang tiap P3A secara *stratafaid random sampling* berdasarkan bagian daerah irigasi (hulu, tengah dan hilir).

### **Model Analisis Data**

Data yang terkumpul sebagai kegiatan penelitian, dianalisis secara deskriptif dan dikembangkan melalui interpretasi berdasarkan pengamatan lapangan (empiris).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kelembagaan P3A**

Kelembagaan P3A yang dianalisis sehubungan dengan Second Intergrated Irrigation Sector Project (IISP-II) di Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 1996/1997 sampai 2000 terdiri atas tingkat perkembangan kelembagaan P3A, dan tanggapan petani terhadap fungsi dan permasalahan P3A.

### **Tingkat Perkembangan Kelembagaan P3A**

Aspek penilaian tingkat perkembangan kelembagaan P3A terdiri atas enam aspek, yaitu organisasi, penggunaan air, pemeliharaan jaringan, keuangan, kondisi fisik jaringan, dan pembinaan P3A yang dianalisis dengan memberikan nilai skor. Hasil penelitian menunjukkan tingkat perkembangan kelembagaan P3A sampel di Nusa Tenggara Barat berada pada kriteria sedang berkembang, dengan pencapaian skor rata-rata 11,78 ( $8 < N < 14$ ). Sebaran tingkat perkembangan P3A, satu P3A (P3A Samalewa Sumbawa) termasuk kriteria berkembang, delapan P3A termasuk kriteria sedang berkembang, dan satu P3A (P3A Bawaq Wani Lombok Tengah) termasuk kriteria belum berkembang. Lebih lanjut pada tabel berikut ditampilkan nilai skor aspek perkembangan masing-masing P3A.

Tabel di bawah menggambarkan nilai skor aspek perkembangan P3A relatif beragam. Nilai skor yang dicapai P3A pada aspek organisasi berkisar antara skor 0,90 sampai 1,40 dengan skor rata-rata 1,20 (80% dari skor maksimal). Keadaan ini ditunjukkan dengan kepengurusan P3A lengkap, AD dan ART telah didaftarkan di pengadilan, AD dan ART sudah dipahami, jumlah anggota yang hadir pada rapat tahunan sebanyak kurang 50%, serta frekuensi rapat pengurus lebih dari dua kali per tahun yang biasa diadakan pada setiap awal musim tanam.

Aspek penggunaan air memperoleh nilai skor rata-rata 2,02 (67,33% dari skor maksimal), dan satu P3A (Tune Ncuhi - Dompu) yang mencapai nilai maksimum. Nilai skor yang belum maksimal ditunjukkan dengan telah ada rencana tentang pola dan tata tanam oleh P3A yang realisasinya antara 50 - 70%, ada rencana pembagian air yang realisasinya lebih dari 70%, dan frekuensi pertemuan antara pelaksana teknis/ulu-ulu dengan mantri pengairan, dan ulu-ulu dengan petani lebih dari satu bulan sekali.

Aspek pemeliharaan jaringan memperoleh nilai skor rata-rata 1,89 (63% dari skor maksimal) dengan kisaran skor 0,75 sampai 3,00. Perolehan nilai skor ini ditunjukkan dengan program kerja pemeliharaan jaringan yang dilakukan setiap musim dengan tingkat realisasinya lebih dari 70%, dan adanya rencana kerja perbaikan dan pengembangan jaringan walaupun realisasinya kurang dari 50%.

Perolehan nilai skor rata-rata pada aspek keuangan 1,15 (46% dari skor maksimal) dengan kisaran skor 0,00 sampai 2,50. Nilai skor nol berarti

P3A tidak/belum menerapkan IPAIR, sebaliknya P3A yang memperoleh nilai 2,50 (P3A Samalewa – Sumbawa) telah menerapkan IPAIR yang alokasi Tabel 1. Nilai Skor Aspek Perkembangan Tiap P3A di NTB Tahun 2000

No	P3A	Aspek Perkembangan (Skor)						Total
		1	2	3	4	5	6	
1.	Beriuq Sadar	1,20	1,55	1,75	0,75	4,50	1,00	10,75
2.	Beriuq Tinjal	1,20	1,30	2,05	1,35	4,00	0,00	9,90
3.	Bawaq Wani	1,10	1,35	0,75	0,90	3,00	0,00	7,30
4.	Kemang	1,20	2,25	2,50	1,75	4,00	2,00	13,70
5.	Setange	1,20	2,25	3,00	2,50	5,50	2,00	16,35
6.	Samalewa	1,40	2,25	1,75	2,25	3,00	2,50	13,15
7.	Sri Nani	1,30	3,00	1,75	0,00	5,50	0,50	12,05
8.	Tune Ncuhi	0,90	2,00	2,55	0,00	5,00	2,00	12,45
9.	Samakai	1,30	2,00	0,25	2,00	5,50	2,00	13,05
10.	Mangge Liro Samada	1,20	2,25	2,55	0,00	2,50	1,00	9,50
Rata-rata		1,20	2,02	1,89	1,15	3,40	1,30	11,78
Skor Max		1,50	3,00	3,00	2,50	6,00	4,00	20,00

Keterangan :

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Organisasi            | 4. Keuangan               |
| 2. Penggunaan air        | 5. Kondisi fisik jaringan |
| 3. Pemeliharaan jaringan | 6. Pembinaan P3A          |

pengeluarannya sesuai AD/ART dan program, dan administrasi keuangan tertib dengan menyampaikan laporan keuangan setiap tahunnya. Adapun perolehan nilai rata-rata (1,15), berarti 60% P3A yang menerapkan IPAIR, jumlah anggota yang telah membayar antara 50 – 70 % dan sebanyak antara 50-70 % pengeluaran biaya sesuai dengan AD/ART dan program, administrasi keuangan tertib, serta menyampaikan laporan keuangan secara tahunan.

Aspek kondisi fisik jaringan memperoleh nilai skor rata-rata 3,40 (56,67% dari skor maksimal) dengan kisaran skor 2,50-5,50. Keadaan ini ditunjukkan dengan kondisi bangunan antara rusak-baik tetapi masih berfungsi, dan kondisi fasilitas penunjang baik tetapi tidak lengkap. P3A yang kondisi bangunannya rusak yaitu P3A Bawaq Wani-Lombok Tengah, dan Samada-Bima. Kerusakan bangunan disebabkan tingkat erosi yang tinggi.

Aspek pembinaan P3A memperoleh nilai skor rata-rata 1,30 (32,50% dari skor maksimal) dengan kisaran 0,00-2,50. Keadaan ini ditunjukkan dengan sebanyak 50% P3A tidak ada pembinaan teknis, 40% P3A

pembinaan teknis setahun sekali, dan 10% P3A yang mendapat pembinaan teknis setiap musim tanamnya, kebutuhan dan pemenuhan bantuan teknis dapat dipenuhi, dan bantuan fisik ada kebutuhan dan dapat dipenuhi.

Ada dua aspek yang memperoleh nilai skor kurang dari 50% dari skor maksimal, yaitu aspek keuangan dan aspek pembinaan P3A. Untuk aspek keuangan baru 20% P3A yang jumlah iurannya terkumpul dari anggota yang membayar sesuai dengan AD/ART dengan jumlah anggota yang membayar lebih dari 70% anggota, dan 40% P3A tidak/belum menerapkan IPAIR. Keadaan ini disebabkan oleh kemandirian P3A dalam memanfaatkan dan menggunakan IPAIR yang terkumpul belum sepenuhnya diberikan, dimana IPAIR yang dikumpulkan P3A masih diserahkan kepada lembaga pemerintah seperti Dinas Pendapatan maupun ke BAPPEDA. Demikian juga halnya dengan aspek pembinaan teknis, karena 50% P3A tidak ada pembinaan teknis yang dilakukan, terutama pembinaan yang berkaitan dengan kelembagaan P3A. Tetapi di lain pihak pengurus P3A pernah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan P3A dan pengurus P3A merasakan manfaatnya walaupun masih terbatas secara individual, bukan secara kelembagaan.

### **Tanggapan Petani Anggota terhadap Fungsi dan Permasalahan P3A**

Fungsi dan permasalahan P3A yang dianalisis terdiri dari sembilan komponen, yaitu P3A berfungsi, pemilihan pengurus, kewibawaan ketua, pelaksanaan pertemuan, distribusi air, pertanggungjawaban keuangan, pelatihan P3A/IPAIR, kunjungan pejabat, dan keterlibatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jaringan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (>50%) petani menanggapi positif terhadap empat komponen, yaitu pemilihan pengurus, kewibawaan ketua, distribusi air, dan pertanggungjawaban keuangan. Sedangkan tiga komponen, yaitu fungsi P3A, pelatihan P3A/IPAIR, dan keterlibatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jaringan sebagian besar petani (> 50%) tanggapannya negatif. Dua komponen yang lain, yaitu pertemuan rutin dan kunjungan pejabat, petani yang memberikan tanggapan positif, negatif maupun yang tidak memberikan tanggapan jumlahnya masing-masing kurang dari 50%.

Kelembagaan P3A yang dikaitkan dengan kegiatan IISP-II yang dapat mendorong lebih mandiriya P3A terutama pada komponen pelatihan dan

keterlibatan petani dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jaringan, hasil penelitian menunjukkan 75% petani (anggota P3A) tidak diikuti dalam pelatihan yang berkaitan dengan P3A dan IPAIR. Keadaan ini berarti pelatihan P3A dan IPAIR lebih difokuskan kepada pengurus, dimana semua pengurus P3A (100%) pernah diikuti dalam pelatihan yang berkaitan dengan P3A dan IPAIR.

Sebaran jumlah petani anggota tentang tanggapan terhadap fungsi dan permasalahan P3A disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tanggapan Petani Anggota terhadap Fungsi dan Permasalahan P3A di NTB

No.	Fungsi dan Permasalahan P3A	Tanggapan Petani (%)		
		Positif	Negatif	Netral
1.	P3A sudah berfungsi dengan baik	33,33	55,00	6,67
2.	Pengurus dipilih secara demokratis	51,67	45,00	3,33
3.	Ketua P3A berwibawa dan dapat menjadi panutan	88,33	8,33	3,33
4.	Pertemuan rutin (pengurus/anggota) dilaksanakan sesuai AD/ART	38,33	48,33	13,33
5.	Distribusi air merata	71,67	25,00	3,33
6.	Pertanggungjawaban keuangan selalu disampaikan dalam rapat anggota	65,00	28,33	6,67
7.	Pernah mendapat pelatihan P3A dan IPAIR	25,00	75,00	0,00
8.	Sering dikunjungi pejabat pemerintah berkaitan dengan pembinaan jaringan irigasi	41,67	33,33	25,00
9.	Petani dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi	6,67	91,67	1,67

Tabel 2 di atas menunjukkan tanggapan petani terhadap berfungsinya P3A sebanyak 55% petani menyatakan bahwa P3A belum berfungsi dengan baik. Keadaan ini didukung oleh 60% P3A dimana anggotanya menyatakan P3A belum berfungsi dengan baik, 20% P3A (Kemang Setange-Sumbawa, dan Samalewa-Sumbawa) anggotanya menyatakan P3A sudah berfungsi dengan baik, 10% P3A (Mangge Liro-Bima) tidak mengetahui apakah P3A sudah berfungsi dengan baik atau tidak, dan 10% P3A (Beriuk Tinjal-Lombok

Tengah) anggotanya menyatakan P3A antara sudah berfungsi dengan baik dan tidak. Dengan gambaran ini, dapat dikatakan keberadaan P3A sebagai suatu lembaga pengairan belum dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan oleh anggotanya, karena masalah pengairan (irigasi) dan kegiatan-kegiatan lainnya anggota menanggulangi secara individu.

Komponen pemilihan pengurus P3A sebagian besar anggota (51,67%) menyatakan pengurus P3A dipilih secara demokratis. Sedangkan sebaran masing-masing P3A, 60% P3A pemilihan pengurusnya dilakukan secara demokratis yaitu dipilih oleh anggota dalam pertemuan dengan memberikan suara, 40% P3A pengurusnya ditunjuk oleh Kepala .Desa. Walaupun demikian 88,33% anggota P3A menilai ketua P3A berwibawa dan dapat menjadi panutan apakah yang dipilih secara demokratis maupun yang ditunjuk. Keadaan ini menunjukkan ketua P3A dapat diterima oleh anggota, karena merupakan individu yang berdedikasi tinggi dan menjadi contoh bagi anggotanya.

Pertemuan rutin (pengurus/anggota), hasil penelitian menunjukkan 38,33% anggota menilai pertemuan dilaksanakan sesuai dengan AD/ART sebanyak lebih dari dua kali setahun; 48,33% anggota menilai pertemuan tidak dilaksanakan sesuai dengan AD/ART, dan 13,33% anggota tidak memberikan penilaian. Untuk masing-masing P3A, 40% P3A anggotanya menilai pertemuan dilaksanakan sesuai dengan AD/ART dan 60% P3A anggotanya menilai pertemuan dilaksanakan tidak sesuai dengan AD/ART. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertemuan rutin yang dilaksanakan P3A tidak sesuai dengan AD/ART, tetapi biasanya pertemuan dilakukan pada setiap awal musim tanam. Hal-hal yang dibicarakan pada pertemuan antara lain pembagian air, pemeliharaan jaringan, dan masalah yang berkaitan dengan usahatani.

Sebagian besar (71,67%) anggota menilai distribusi air merata baik untuk para anggota maupun pada bagian irigasi P3A (hulu, tengah, hilir), walaupun demikian 20% P3A (Beriuk Sadar-Lombok Tengah, dan Beriuk Tinjal-Lombok Tengah) anggotanya menilai distribusi air tidak merata, karena air tidak tersedia sepanjang tahun. Hasil penelitian menunjukkan juga masih ada beberapa anggota yang melakukan pencurian air/perusakan jaringan irigasi, yaitu terjadi pada P3A Beriuk Sadar dan P3A Bawaq Wani - Lombok Tengah, Sri Nani - Sumbawa, Tune Ncuhi dan Samakai – Dompnu. Sejauh itu sanksi tidak dapat diterapkan dengan tegas, tetapi masih terbatas pada teguran secara lisan oleh pengurus P3A.

Pertanggungjawaban keuangan, hasil penelitian menunjukkan 65% anggota menilai selalu disampaikan melalui rapat anggota, terutama pada P3A yang telah menerapkan IPAIR bagi anggotanya. Sedangkan sebaran P3A menunjukkan 70% P3A anggotanya menilai pertanggungjawaban keuangan selalu disampaikan dalam rapat anggota, dan 30% P3A tidak melakukan pertanggungjawaban keuangan, karena P3A (Tune Ncuhi dan Samakai–Dompou, Samada–Bima) belum menerapkan IPAIR bagi anggotanya. P3A yang telah menerapkan IPAIR realisasi pemungutan lebih dari 50% yaitu P3A Bawaq Wani–Lombok Tengah, Samalewa dan Sri Nani–Sumbawa, dan Mangge Liro–Bima (lebih dari 75%), sedangkan P3A Beriuk Sadar dan Beriuk Tinjal–Lombok Tengah, Kemang Setange–Sumbawa realisasi pemungutan IPAIR kurang dari 50%.

Sebanyak 75% anggota menyatakan tidak pernah dilibatkan untuk mengikuti pelatihan P3A/IPAIR, dan P3A yang anggotanya pernah mendapat pelatihan P3A/IPAIR hanya P3A Tune Ncuhi–Dompou walaupun pelatihan yang diperoleh sebenarnya lebih berkaitan dengan usahatani dan demonstrasi (IADU). Keadaan ini menggambarkan anggota P3A masih kurang pengetahuan tentang P3A dan IPAIR.

Kunjungan pejabat pemerintah berkaitan dengan pembinaan jaringan irigasi menunjukkan 41,67% anggota menilai sering dikunjungi; 33,33% tidak pernah dikunjungi, dan 25% tidak mengetahui. Sedang masing-masing P3A 50% anggotanya menilai pejabat pemerintah sering berkunjung berkaitan dengan pembinaan jaringan irigasi, 30% P3A anggotanya menilai tidak pernah dikunjungi, dan 10% P3A anggotanya menilai tidak pernah dikunjungi dan tidak mengetahui, serta sisanya (10%) P3A anggotanya menilai antara sering dan tidak mengetahui.

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi hasil penelitian menunjukkan 91,67% anggota menyatakan tidak pernah dilibatkan, karena pada kegiatan ini IISP-II pelaksanaannya biasanya diserahkan kepada pihak ke tiga (kontraktor), dan P3A menyediakan lokasi dan sebagai tenaga buruh. Keadaan ini tergambar dari 100% P3A anggotanya menyatakan tidak dilibatkan pada kegiatan tersebut. Dengan demikian berarti anggota P3A tidak merasa memiliki dan kurang berpartisipasi untuk pembangunan jaringan irigasi.

### **Pelaksanaan Penerapan IPAIR Paradigma (Sistem) Baru**

Seiring dengan perkembangan keadaan dan mencermati hasil pelaksanaan pemungutan iuran pengelolaan air irigasi (IPAIR) yang kurang menggembirakan, maka mulai Tahun Anggaran 1999/2000 pelaksanaan IPAIR mengalami perubahan paradigma, yaitu dengan pola “**dari untuk dan oleh petani**”.

Dengan paradigma baru ini, dana IPAIR tidak lagi masuk atau dibukukan dalam APBD tetapi dikelola oleh P3A. Sehingga P3A lebih diberdayakan dan bergairah untuk mengelola dana IPAIR mulai dari pemungutan, penyimpanan, dan penggunaannya. Dengan demikian bila terjadi persoalan-persoalan atau kerusakan-kerusakan pada jaringan irigasi P3A dapat mengatasinya dengan sesegera mungkin.

Dalam studi pelaksanaan penerapan IPAIR sistem baru difokuskan pada P3A yang sudah pernah mendapatkan pelatihan dari Dinas Pendapatan Propinsi NTB. Dari P3A yang sudah pernah dilatih ini diharapkan mendapatkan gambaran secara riil pelaksanaan IPAIR dengan sistem baru. Untuk menjawab tujuan tersebut, dalam studi diteliti 2 kelompok sikap, yaitu meliputi (a) keterlibatan petani dalam pelatihan dan pemahamannya terhadap IPAIR pola baru; (b) Realisasi pemungutan IPAIR dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### **a. Keterlibatan Anggota P3A dalam Pelatihan dan Pemahamannya terhadap IPAIR Pola Baru**

Keterlibatan petani dalam pelatihan dan pemahaman (persepsi) mereka terhadap IPAIR pola baru merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan program tersebut. Dari paparan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa IPAIR dengan paradigma barunya dimaksudkan untuk lebih memberdayakan dan menggairahkan P3A dalam mengelola dana IPAIR. Namun jika seluruh anggota P3A tidak mengetahui maksud dan tujuan IPAIR pola baru tersebut, maka tujuan yang diinginkan akan sulit untuk diwujudkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya petani tidak (belum) pernah mendapatkan pelatihan dan tidak memahami akan maksud dan tujuan IPAIR pola baru. Keadaan ini dituang oleh data bahwa seluruh responden anggota P3A (100%), menyatakan tidak pernah mendapatkan pelatihan tentang IPAIR pola baru, hanya pengurus saja

(sekretaris dan ketua P3A) yang pernah mendapatkan pelatihan tersebut. Keadaan ini diperburuk oleh suatu kenyataan bahwa pengurus yang pernah mengikuti pelatihan pada umumnya tidak pernah meneruskan hasil atau informasi yang diperoleh kepada anggota P3A. Dari seluruh responden, sekitar 63% menyatakan belum pernah mendapatkan hasil atau informasi yang diperoleh pengurus P3A. Keadaan ini menunjukkan bahwa pertemuan rutin antara pengurus dan anggota P3A jarang sekali diadakan, meskipun pada P3A yang sudah dianggap mantap oleh Dispenda. Sehingga informasi yang penting akan keberadaan IPAIR pola baru tersebut belum banyak diketahui oleh anggota P3A.

Kenyataan di atas nampaknya berdampak pada rendahnya pemahaman anggota P3A terhadap manfaat IPAIR. Dari data hasil penelitian diketahui meskipun 41,57% responden menyatakan mengetahui manfaat IPAIR, namun masih ada sekitar 58,33% responden yang tidak memahami manfaat yang diperoleh dengan adanya IPAIR. Bagi mereka IPAIR merupakan salah satu bentuk pajak yang harus mereka bayar. Keadaan ini dapat dibuktikan dari pengetahuan petani terhadap alokasi penggunaan IPAIR, bahwa sekitar 61,67% responden menyatakan bahwa selama ini mereka tidak mengetahui alokasi penggunaan IPAIR.

Lebih ekstrim lagi ketika diminta pendapatnya tentang dilaksanakannya IPAIR sistem baru ini, hanya sebagian kecil responden (33,33%) yang menyatakan lebih menyukai IPAIR sistem baru ini, sedangkan 66,77% menyatakan lebih menyukai IPAIR pola lama atau tidak tahu perbedaannya antara kedua bentuk IPAIR tersebut. Sebagai gambaran, kasus di P3A Bawak Wani menunjukkan bahwa mereka tidak memahami betul manfaat yang diperoleh dari IPAIR dengan pola baru. Menurut Ketua dan para pengurus lainnya bahwa hasil pungutan IPAIR tidak pernah masuk rekening P3A, melainkan disetorkan kepada juru pengawas pengairan. Setelah diadakan konfirmasi dengan juru pengawas pengairan, cara ini diambil karena sementara ini di antara P3A gabungan belum ada yang saling percaya.

#### **b. Realisasi Pemungutan IPAIR dan Faktor-faktor yang Berpengaruh**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum realisasi pemungutan IPAIR pola baru (pasca pelatihan) kurang dari 50%.

Kenyataan ini menunjukkan belum adanya suatu perubahan yang signifikan dari realisasi pemungutan IPAIR pola lama ke IPAIR pola baru.

Dari sikap petani diketahui bahwa rendahnya realisasi bukan oleh mahalnnya tarif IPAIR yang ditetapkan serta tidak terdistribusi air secara merata, melainkan disebabkan oleh kurang baiknya kinerja P3A sendiri. Ini terbukti bahwa P3A tidak pernah melaksanakan sanksi yang sudah ditetapkan bersama kepada anggota yang tidak membayar IPAIR. Bila keadaan ini dibiarkan terus, maka akan mendorong lebih banyak petani untuk tidak membayar IPAIR pada tahun-tahun berikutnya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Tingkat Perkembangan kelembagaan P3A di Nusa Tenggara Barat berada pada kriteria sedang berkembang dengan pencapaian skor 11,78.
2. Tanggapan petani terhadap fungsi dan permasalahan P3A positif, artinya apa yang diharapkan dari IISP-II sudah berjalan, kecuali pada P3A yang tingkat perkembangan belum berkembang dan petani yang tidak diikutkan dalam pelatihan tentang kelembagaan P3A dan IPAIR.
3. Petani anggota P3A belum mengetahui secara sungguh-sungguh manfaat yang diterima dari program IPAIR pola baru
4. Realisasi penerimaan IPAIR masih rendah yaitu kurang dari 50%, yang disebabkan belum mantapnya kelembagaan P3A dan masih kurangnya informasi IPAIR pola baru yang diperoleh petani anggota P3A.

### **Saran**

Perlu adanya pembinaan secara langsung yang terkoordinasi, baik antara pemerintah dengan pengurus P3A, maupun di antara instansi pemerintah yang terkait dengan pembinaan P3A, dengan sasaran utama memperbaiki dan memantapkan kelembagaan P3A dan meningkatkan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman petani anggota P3A tentang tujuan program IPAIR pola baru.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis menyampaikan terima kasih kepada **Crescent Cabang Nusa Tenggara Barat** yang telah memberikan kesempatan dan bantuan dana dalam pelaksanaan penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pekerjaan Umum Kanwil Propinsi NTB, Proyek Irigasi Lombok (1995). *Studi Agro Institutional Profile (AIP), Lokasi Lombok-Sumbawa Nusa Tenggara Barat*, Tahun Anggaran 1994/1995 & 1995/1996.
- \_\_\_\_\_, (1995). *Analisa Singkat Sosial Pedesaan (Rapid Rural Social Assessment) di Embung Bombas*, Tahun Anggara 1995/1996.
- Ghatak, Subrata (1994) Pertanian dan Pembangunan Ekonomi, dalam Norman Gemmel (1994) *Ilmu Ekonomi Pembangunan, Beberapa Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Provincial Working Group, IISP-II Propinsi Nusa Tenggara Barat (2000).. *Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program IISP-II Propinsi Nusa Tenggara Barat*, Komponen A (Pengembangan Irigasi).
- \_\_\_\_\_, (2000). *Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program IISP-II Propinsi Nusa Tenggara Barat*, Komponen B (Pengembangan Pertanian).